



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMUT
NOMOR : 15 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA SEMUT KECAMATAN WONOKERTO
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA SEMUT KECAMATAN WONOKERTO
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Semut tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Semut Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMUT TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA SEMUT KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Semut Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Semut
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Semut
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semut

Pada tanggal : 11 September 2025

Kepala Desa Semut



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan ;
2. Camat Wonokerto ;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa SEMUT
Nomor : 15
Tanggal : 11 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM)
DESA SEMUT KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	SUGIYONO	Kepala Desa	SEMUT RT 09 RW 05	Pembina
2.	MOHADI	Perangkat Desa	SEMUT RT 09 RW 05	Ketua
3.	TARYUDI	Perangkat Desa	SEMUT RT 05 RW 02	Wakil Ketua
4.	WINARSO	Perangkat Desa	SEMUT RT 06 RW 03	Sekretaris
5.	MARKHALI	LPMD	SEMUT RT 12 RW 06	Bendahara
6.	HENI SULISTYO	Ketua RT	SEMUT RT 01 RW 01	Anggota
7.	KASTARI	Ketua RT	SEMUT RT 02 RW 01	Anggota
8.	DASTRO	Ketua RT	SEMUT RT 03 RW 01	Anggota
9.	CASRONI	Ketua RW	SEMUT RT 04 RW 02	Anggota
10.	WARYONO	Ketua RT	SEMUT RT 05 RW 02	Anggota
11.	CASMANI	Ketua RT	SEMUT RT 06 RW 03	Anggota
12.	SUPRIYANTO	Ketua RT	SEMUT RT 07 RW 03	Anggota
13.	NUROCHIM	Ketua RW	SEMUT RT 08 RW 04	Anggota
14.	CASNARI	Ketua RT	SEMUT RT 09 RW 05	Anggota
15.	TRIMO	Ketua RT	SEMUT RT 10 RW 05	Anggota
16.	SUPRIYONO	Ketua RT	SEMUT RT 11 RW 05	Anggota
17.	RISKIONO	Ketua RT	SEMUT RT 12 RW 06	Anggota
18.	CASMUDI	Ketua RT	SEMUT RT 13 RW 06	Anggota

Ditetapkan di : Semut

Pada tanggal : 11 September 2025

